AQUABIS

Jurnal Ilmiah Program Studi Budidaya Perairan

Volume 7 Nomor 2 Desember 2017

ISSN: 2301-5705

SANITASI DAN HYGIENE PADA PROSES PEMBUATAN RAMBAK IKAN BUNTAL PISANG (<i>Tetraodon lineatus</i>) DI UKM JAYA UTAMA KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR Rahyuni Syamsudin Domili	1
NILAI MANFAAT LANGSUNG EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI TAMAN WISATA PERAIRAN PADAIDO, PAPUA Ni'mawati Syariah	7
STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS PADA EKOSISTEM PADANG LAMUN DI PERAIRAN PANTAI LOGPON DESA MOLANTADU KABUPATEN GORONTALO UTARA. Nurul Auliyah, Candra Masuara	13
TINGKAT KESUKAAN DAN KADAR PROTEIN ILABULO CUMI-CUMI YANG BERSUBSTITUSI TEPUNG TAPIOKA Yulianti	19
REHABILITASI LAHAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT PESISIR DI DAS RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO Dewa Oka Suparwata	23
PEMBERIAN DOSIS PAKAN OTOHIME YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH IKAN KERAPU BEBEK (<i>Chromileptes altivelis</i>) Erlansyah, Hasim, dan Mulis	33
PENGARUH PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN IKAN NILA GIFT (<i>Oreochromis niloticus</i>) DENGAN PROPORSI PROTEIN PAKAN YANG BERBEDA Titin Liana Febriyanti	39

REHABILITASI LAHAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT PESISIR DI DAS RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO

Dewa Oka Suparwata

Program Studi Agribisnis, Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email: suparwata_do@umgo.ac.id

Abstract

The aim of the research is to examine the role and participation of the community in the rehabilitation of mangrove land at DAS Randangan, Pohuwato Regency. This research was carried out in DAS Randangan Pohuwato Regency in October to December 2016. The research is designed by using a survey approach, using data analysis description. The results showed that the level of participation of the community on rehabilitation of mangrove land on the planning stages is categorized as low, (50% of the community did not participate) in stage of implementation is categorized as high (38.89% community participation), and evaluation stages is categorized as low (50% of the public did not participate). This indicates that there is still a lack of community's desire to keep the environment through mangrove rehabilitation. Therefore, the role of the community is required to: (a) to greenwashcoastal areas due of logging mangrove (divert the forest) be farmed, (b) addressing and preventing the occurrence of abrasion of the beach, and (c) return the mangrove plants function as filters from sea water that has been polluted by toxic substances/toxins, (d) create a natural habitat for spawning fish as well as the life of flora and fauna of the coast.

Keyword: Land rehabilitation, mangrove, coastal communities, role and participation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan mangrove di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini dilaksanakan di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato, pada Bulan Oktober sampai Desember 2016. Didesain dengan menggunakan pendekatan survei, menggunakan analisis data deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada rehabilitasi lahan mangrove pada tahap perencanaan tergolong rendah, dengan 50% masyarakat kadang berpartisipasi, tahap pelaksanaan tergolong tinggi (38.89% masyarakat berpartisipasi), dan tahap evaluasi tergolong rendah (50% masyarakat tidak berpartisipasi). Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui rehabilitasi mangrove. Sehingga peran masyarakat dibutuhkan untuk: (a) menghidupkan kembali daerah pesisir pantai akibat penebangan mangrove (alih fungsi hutan) menjadi lahan tambak, (b) mengatasi dan mencegah terjadinya abrasi pantai, dan (c) mengembalikan fungsi tanaman mangrove sebagai filter dari air laut yang telah tercemar oleh zat toksik/racun, (d) membuat habitat alami untuk pemijahan ikan serta kehidupan flora dan fauna pesisir pantai.

Kata Kunci: Rehabilitasi lahan, mangrove, masyarakat pesisir, peran dan partisipasi

PENDAHULUAN

Laju kerusakan mangrove salah satunya disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk yang merubah kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budidaya ataupun penggunaan lain yang dapat merubah kondisi hutan mangrove. Triwanto (2012), menggambarkan maka pada akhirnya luas lahan akan berkurang, dan kualitas lingkungan mengalami degradasi. Fungsi vital mangrove untuk penyangga kehidupan manusia dan keseimbangan alam semakin menurun dengan

semakin luasnya penebangan mangrove yang berkorelasi pada luasnya lahan mangrove yang kritis. Menurut Ali *et al.*, (2015), bahwa manajemen hutan telah berubah dari paradigma pertama hutan menjadi paradigma kedua hutan yang menekankan pada keseimbangan antara dinamika ekologi dan dinamika sosial (ekonomi, budaya, dan politik) dalam pengelolaan hutan. Perubahan kawasan mangrove tersebut juga akan memberikan dampak buruk pada kawasan pesisir dan kehidupan masyarakat sekitarnya.

Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang memiliki berbagai sumberdaya alam dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya. Menurut Fitri dan Iswahyudi (2010), wilayah pesisir memiliki berbagai ekosistem, seperti hutan mangrove, rawa payau, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang. Salah satu pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pesisir biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hutan mangrove sebagai penyedia sumberdaya alam. Lumbessy *et al.*, (2015), menyatakan bahwa pemanfaatan hutan mangrove dapat mendukung peningkatan hasil tangkapan ikan dan budidaya tambak yang diusahakan para nelayan dan petani tambak. Oleh sebab itu keseimbangan ekosistem hutan mangrove harus dipertahankan. Novianty *et al.*, (2011), hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi tetapi sangat rentan dengan kerusakan apabila kurang bijaksana dalam memanfaatkan, melestarikan dan mengelolanya.

Tantangan saat ini adalah bagaimana mempertahankan keutuhan mangrove untuk keberlangsungan ekosistem pesisir diseluruh kawasan di Gorontalo khususnya di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kerusakan hutan mangrove terparah. Opa (2010), melaporkan bahwa keberadaannya kian terancam dan memprihatinkan, dimana sebanyak 70 persen dari luas kawasan hutan mangrove ini terindikasi mengalami kerusakan, dan sebagian besar di antara-nya tergolong rusak parah. Dari luasan 25.688,09 hektar hutan mangrove yang ada di Kabupaten Pohuwato, telah terjadi kerusakan berat seluas 14.017,58 hektar, dan rusak 7.546,89 hektar sedangkan kondisi baik atau tidak rusak hanya tersisa 4.123,62 hektar.

Dampak lanjut kerusakan lahan mangrove adalah lajunya tingkat degradasi lahan mangrove yang digunakan oleh masyarakat. Dari degradasi tersebut lebih lanjut akan membentuk pertumbuhan laju lahan-lahan kritis. Data BP-DAS Bone Bolango (2009) menunjukkan bahwa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Randangan bahwa luas lahan kritis untuk wilayah DAS Randangan mencapai 91.494 Ha, terdiri dari 18.832 Ha di luar kawasan hutan, dan 72.662 Ha berada di dalam kawasan hutan. Kerusakan DAS Randangan ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak mengkonservasi mangrove. Padahal jika dilihat

amanat dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan dapat dimanfaatkan untuk khalayak yang sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, juga berkontribusi meningkatkan daya dukung DAS dan mempertahankan kecukupan hutan minimal 30% dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional. Namun demikian tidak berarti mengesampingkan aspek lingkungan, yang kemudian dapat melakukan pembabatan secara bebas terhadap sumberdaya alam. Sebab fungsi utama hutan bukan saja sebagai penopang ekonomi masyarakat, tetapi menjaga ekologi dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

Langkah tatis dalam mengembalikan kondisi hutan mangrove adalah dengan merehabilitasi kembali mangrove terutama pada kawasan pesisir pantai. Bismark *et al.*, (2009), rehabilitasi merupakan upaya memulihkan kembali dan memperbaiki lahan yang rusak agar dapat berfungsi kembali secara optimal. Berbagai upaya rehabilitasi lahan mangrove dilakukan masyarakat pesisir untuk mengembalikan kembali fungsi ekosistem, seperti penanaman kembali. Akan tetapi rehabilitasi hutan mangrove dengan cara menanam selama ini sangat tidak sebanding dengan laju perusakannya yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan untuk merehabilitasinya. Kerusakan mangrove juga disebabkan oleh peningkatan penggunaan lahan pantai serta pengelolaan ekosistem mangrove yang belum memperhatikan aspek kelestariannya, dalam hal ini sekitar 22% penduduk Indonesia dengan tingkat pertumbuhan 3,6% bermukim di kawasan pantai dan sekitar 50% ekonomi mereka tergantung pada kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah pantai, termasuk hutan mangrove.

Mengingat pentingnya nilai ekosistem dalam mendukung kelestarian sumberdaya pesisir, begitu juga ancaman terhadap kelestariannya, maka diperlukan rehabilitasi lahan mangrove secara berkelanjutan. Disinilah peran serta masyarakat itu berpengaruh untuk merehabilitasi kembali lahan mangrove yang telah kritis. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam merehabilitasi mangrove. Partisipasi disini dimaksudkan ialah adanya keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan mangrove yang telah kritis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengkaji peran dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan mangrove di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian, adanya partisipasi/keikutsertaan masyarakat pesisir dalam mengkonservasi lahan mangrove dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian mangrove secara kontinyu.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato pada wilayah pesisir pantai desa Dudewulo, Yipilo dan Suka Damai. Lokasi ini dipilih secara *purposive*, dengan dasar pertimbangan bahwa pada lokasi ini terdapat 3 kelompok masyarakat perehabilitasi lahan mangrove yang telah kritis. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2016.

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan survei. Menurut Morissan (2014) dengan survei ini berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini. Kajian penelitian ini berupaya mengkaji fakta-fakta, fenomena, situasi, kejadian, norma, yang ada di tingkat masyarakat perehabilitasi mangrove di DAS Randangan.

Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Jumlah Populasi dalam penelitian ini berjumlah 18 orang yang merupakan masyarakat pesisir yang melakukan rehabilitasi lahan mangrove. Penentuan sampel penelitian menggunakan sampling jenuh atau sensus. Artinya bahwa seluruh populasi tersebut digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah populasi yang sedikit sehingga telah jenuh dan secara otomatis keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara bersama responden dengan menggunakan panduan pertanyaan berupa angket/kuesioner. Sedangkan data sekunder yang dimaksud

diperoleh dari dinas BP-DAS Bone Bolango, data Dinas Kehutanan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, dan literature lain yang mendukung penelitian ini.

Analisis Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Nasir (2013), metode analisis deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan metode deskripsi adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lahan Mangrove di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo memiliki 14 Kecamatan, 101 Desa dan 3 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah 4.244,31 km² atau 36,77% dari total luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato terletak antara 0°22'–0°57' Lintang Utara dan 121°23'–122°19' Bujur Timur (BPS Kabupaten Pohuwato, 2016). Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terkenal dengan jalur hijau mangrove dan keberadaan mangrove sebagai ekosistem pantai cukup luas terbentang dari Kecamatan Paguat hingga Kecamatan Popayato Barat. Luas tutupan hutan mangrove di kawasan ini makin menurun, tercatat dari tahun 1988 seluas 13.243,33 Ha, dan di tahun 2010 tinggal 7.420,73 Ha. (Djamaluddin, 2011 dalam Utina *et al.*, 2014a). Berdasarkan data tersebut, terdapat kecenderungan penurunan luas lahan mangrove yang cukup signifikan.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan luas lahan mangrove diantaranya adalah alih fungsi menjadi lahan tambak. Opa (2010), menyatakan bahwa faktor penyebab rusaknya hutan mangrove di daerah ini antara lain adalah pemanfaatan yang tidak terkontrol, karena ketergantungan masyarakat yang menempati wilayah pesisir sangat tinggi, konversi hutan mangrove untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan, tambak, pemukiman, kawasan industri, wisata dan lain-

lain, tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar.

Baderan *et al.*, (2015), menambahkan luas hutan mangrove di kawasan pesisir ini makin menurun akibat tekanan ekonomi masyarakat dan aktivitas penduduk yang melampaui daya dukung. Alih fungsi hutan mangrove khususnya di wilayah pesisir Toroseaje yang tidak terkendali menyebabkan perubahan luasan mangrove dan hilangnya flora dan fauna di lokasi ini. Lebih parah lagi, ekosistem ini berubah peruntukannya menjadi tambak yang produktif dan non produktif. Aktivitas masyarakat ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rusaknya mangrove karena beberapa persoalan utama (Utina *et al.*, 2014b), bahwa persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk desa pesisir dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya alam yang tersedia. Buah mangrove selama ini belum dimanfaatkan penduduk sebagai bahan dasar pangan, misalnya penganan khas berbahan dasar buah mangrove yang mengisi pasar lokal maupun nasional juga masih terbatas.

Luas tutupan mangrove di kabupaten pun dari tahun ke tahun semakin berkurang. Terlihat dari perkembangan dan perubahan hutan mangrove menjadi lahan tambak untuk budidaya ikan. Tren penurunan luasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato sangat signifikan (Gambar 1). Nahib dan Sudarmadji (2010), melaporkan bahwa laju degradasi hutan mangrove sebesar 2.324 hektar selama 12 tahun, sedangkan nilai ekonomi total dari hutan mangrove di Kabupaten Pohowato yang meliputi hutan mangrove 6.864 ha dan tambak 5.139 ha sebesar Rp 141 milyar /tahun.

Gambar 1. Luas tutupan mangrove dan tren penurunan luasan mangrove. a) Tahun 1988-1991, b) Tahun 2001-2003, c) Tahun 2009-2010, d) Tren penurunan luasan mangrove Tahun 1988-2010. (Sumber: Dako, 2014)

Partisipasi dan Peran Masyarakat pada Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Pantai DAS Randangan Kabupaten Pohuwato

Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif atau keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran serta secara aktif anggota masyarakat berarti pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang, tetapi merupakan pula tantangan bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan yang efektif, positif, produktif dan dinamis (Adisasmita, 2006). Partisipasi menekankan pada keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Theresia *et al.*, 2014). Partisipasi bukan saja ikut menyumbangkan sesuatu input kedalam pembangunan, tetapi termasuk ikut menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan (Sangadji, 2007).

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis, tujuannya agar kegiatan rehabilitasi dapat berhasil dan memperkecil laju degradasi lahan (Suparwata, 2016). Nurmayanti (2010), menambahkan bahwa keberhasilan tingkat partisipatif sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, biasanya partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah terkena kebijakan, program atau proyek dimungkinkan untuk: 1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif; 2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah; 3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima dan 4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan dalam penerapan.

Partisipasi masyarakat pada rehabilitasi mangrove dapat dilihat dalam tiga indikator kegiatan, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan dalam penentuan lokasi rehabilitasi, jenis bibit yang akan dikembangkan, merencanakan rapat. Pada tahap pelaksanaan beberapa kegiatan dilakukan seperti melakukan pembibitan, memelihara bibit

tanaman, menanam pohon mangrove dan juga melakukan pemeliharaan pohon mangrove. Sedangkan pada tahap evaluasi beberapa kegiatan dilakukan diantaranya memonitoring pertanaman mangrove, memberikan laporan yang benar kepada pemerintah, dan juga melakukan pengecekan secara berkala pada areal atau lahan rehabilitasi mangrove di pesisir pantai. Hasil penelitian partisipasi masyarakat pada rehabilitasi lahan mangrove di DAS Randangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat partisipasi masyarakat pada rehabilitasi lahan mangrove di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato

Tahap Partisipasi	Persentase (%) Tingkat Partisipasi Masyarakat				
	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Cukup	Sering	Sering Sekali
Perencanaan	33.33	50	5.56	11.11	0
Pelaksanaan	27.78	11.11	16.67	38.89	5.56
Evaluasi	50	38.89	0	11.11	0

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Rehabilitasi Lahan Mangrove

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa taraf partisipasi pada kisaran 50% kadang-kadang, 33.33% tidak pernah, 11.11% sering, 5.56 cukup, dan 0% sering sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan rehabilitasi lahan kritis di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh tidak secara keseluruhan masyarakat diberikan kewenangan dalam menentukan rencana dalam rehabilitasi lahan kritis seperti yang dipaparkan oleh masyarakat perrehabilitasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh Ansori (2012), bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan tergolong rendah karena 61,1% mengatakan tidak ikut di dalam perencanaan. Dipokusumo (2011), juga mengungkapkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan tergolong rendah (60,7% tidak ikut dalam perencanaan). Korelasi yang disampaikan oleh Ansori (2012), bahwa faktor rendahnya pendidikan dari para petani sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam membuat perencanaan. Oleh sebab itu Sahureka (2008), mengkritisi bahwa masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan

saja, ada yang tertarik dengan upah kerjanya maupun atas dasar kesadaran mereka dalam melestarikan hutan.

Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Mangrove

Pada tahap pelaksanaan (Tabel 1), menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki partisipasi yang tergolong tinggi atau baik. Hasil menunjukkan bahwa 38.89% sering, 27.78% tidak pernah, 16.67% cukup, 11.11% kadang-kadang, dan 5.56% sering. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap pelaksanaan masyarakat lebih aktif dibandingkan dengan tahap perencanaan. Bila hal ini terus berlanjut maka kerawanan rusaknya mangrove akan berangsur-angsur mengecil. Dikatakan oleh Dewi (2013), bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berada pada level tertinggi dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan evaluasi. Pudjianto (2009), bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan secara umum tergolong sedang (46,8%). Laporan oleh Dipokusumo (2011) bahwa dalam implementasi sebagian besar berada pada posisi aktif (64,5%). Ditambahkan oleh Muis (2007), bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong tinggi. Azis (2006) menguatkan bahwa tingkat partisipasi sebagian besar peserta GN-RHL di empat desa penelitian dalam kegiatan tahap pelaksanaan program tergolong tinggi yaitu sebesar 62,50%.

Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Evaluasi Rehabilitasi Lahan Mangrove

Partisipasi dalam evaluasi lahan mangrove pada penelitian ini diperoleh nilai partisipasi yang rendah. Data menunjukkan (Tabel 1) bahwa 50% tidak pernah, 38.89% kadang-kadang, 11.11% sering, 0% (cukup dan sering sekali). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak berperan aktif dalam kegiatan evaluasi mangrove terlihat dari nilai partisipasi yang diberikan pada tahap evaluasi program. Dalam hal ini bahwa masyarakat memiliki porsi pengambilan keputusan yang kecil dalam menentukan evaluasi program rehabilitasi lahan mangrove. Seperti yang dilaporkan oleh Suparwata *et al.*, (2016) bahwa pada tahap evaluasi kegiatan rehabilitasi lahan kritis tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah (71.7%) masyarakat tidak berpartisipasi

pada tahap evaluasi. ditambahkan oleh Sandyatma dan Hariadi (2012), bahwa tingkat keterlibatan anggota Gapoktan pada tahap pemantauan dan evaluasi hanya mencapai 25,17%. Sehingga dalam evaluasi semestinya suara masyarakat itu dapat terwakili karena untuk perbaikan program selanjutnya. Hal ini disayangkan oleh Pardosi *et al.*, (2005) bahwa jika suara masyarakat tidak terwakili (*voicelessness* dan *powerlessness*) dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan akan sangat mempengaruhi kehidupan/kesejahteraan mereka.

Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Mangrove

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan masyarakat diperoleh beberapa masukan terhadap peran masyarakat dalam ikut merehabilitasi lahan-lahan mangrove yang telah kritis. Peran masyarakat tersebut diantaranya: (a) menghijaukan kembali daerah pesisir pantai akibat penebangan mangrove (alih fungsi hutan) menjadi lahan tambak, (b) masyarakat telah berperan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya abrasi pantai, dan (c) melalui rehabilitasi masyarakat mengembalikan fungsi tanaman mangrove sebagai filter dari air laut yang telah tercemar oleh zat toksik/racun, dan (d) masyarakat telah berupaya membuat habitat alami untuk pemijahan ikan serta kehidupan flora dan fauna pesisir pantai. Sehingga rehabilitasi wilayah pesisir laut sangat dibutuhkan keberlanjutannya.

Namun, disamping perlunya keberlanjutan program, terdapat pula beberapa pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa program rehabilitasi ini tidak perlu dan tidak juga berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Beberapa alasan yang dikemukakan, diantaranya: (a) masyarakat merasa kecewa dengan pemerintah karena realisasi program yang terhutang lambat, (b) bantuan yang diberikan tidak 100% dapat diterima masyarakat dan tergolong kecil bila dibandingkan dengan ongkos kerja dalam kegiatan rehabilitasi, dan (c) beberapa masyarakat beranggapan bahwa penanaman tanaman mangrove tidak memberikan produksi sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saat ini.

Berdasarkan hal tersebut maka konsepsi tentang keberlanjutan dalam konservasi selalu

berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat. Bagaimana dapat meningkatkan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Seperti yang dikemukakan oleh Fauzi dalam Jaya (2004), bahwa salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain. Jaya (2004), pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumberdaya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.

Upaya Rehabilitasi Lahan Mangrove

Upaya rehabilitasi lahan merupakan upaya pengembalian fungsi lahan beserta ekosistemnya yang sudah tidak produktif menjadi produktif kembali dan dapat berfungsi secara optimal. Menurut Butolo (2014), rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang semakin meluas dan berlangsung semakin cepat sebagai akibat dari berbagai aktivitas pembangunan yang tidak terencana dan terkoordinasi dengan baik.

Saat ini program rehabilitasi mangrove banyak dilakukan baik oleh masyarakat sekitar pesisir maupun *stakeholder* mangrove diberbagai daerah di wilayah Indonesia. Karena mengingat dari tahun ke tahun kerusakan lahan mangrove semakin bertambah. Tidak terkecuali masyarakat pesisir yang berada di daerah Kabupaten Pohuwato yang turut mengambil bagian dalam melakukan rehabilitasi lahan mangrove. Menurut Rusdiati dan Suninto (2012), upaya rehabilitasi yang dilakukan memerlukan partisipasi aktif dari penduduk lokal, diantaranya adalah aktor atau pelaku konversi. Freitas (2014), menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan pesisir merupakan suatu aset sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna memelihara hutan mangrove.

Upaya rehabilitasi lahan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat pesisir adalah melakukan penanaman kembali. Utina *et al.*, (2014a) melaporkan bahwa penanaman kembali hutan mangrove dilahan rehabilitasi seluas 7 ha telah dilaksanakan, dan menghabiskan bibit mangrove sebanyak 75.000 *polybag*. Akan tetap penanaman saja tidak cukup untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove, belum lagi jika spesies yang digunakan hanya satu hingga dua spesies saja. Karena hal ini dapat menyebabkan perubahan terhadap habitat dan penurunan fungsi ekologi ekosistem mangrove tersebut karena sifatnya yang homogen dibandingkan dengan yang alami (heterogen dan banyak spesies), yang merupakan biodiversitas dalam kaitannya dengan kekayaan genetik (Mancintosh *et al.*, dalam Haikal, 2008). Sehingga setelah dilakukan penanaman, untuk menjaga kondisi dan komitmen masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove, dilakukan juga pendampingan secara *kontinue*. Selain itu, Utina *et al.*, (2014a), usaha pemberdayaan masyarakat Pohuwato dilakukan secara berkelompok dengan mengelola hasil dari pohon mangrove sebagai olahan makanan diantaranya buah mangrove yang diolah menjadi bahan pangan terdiri dari jenis *Bruguiera gymnorhiza* (bahasa Bajo: "Munto"), *Avicennia* spp (bahasa Bajo: "Apappi"), dan *Sonneratia caseolaris* (bahasa Bajo: "Pappa") menjadi pia mangrove, dodol, stick, cake, pudding, kerupuk dan keripik. Usaha ini dikatakan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir yang notabenenya bermata pencaharian sebagai nelayan.

KESIMPULAN

Upaya rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekologi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Mendukung upaya tersebut maka sangat dibutuhkan partisipasi dan peran sertadari masyarakat pesisir di Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat padarehabilitasi lahan mangrove pada tahap perencanaan tergolong rendah (50% masyarakat kadang berpartisipasi), tahap pelaksanaan tergolong tinggi (38.89% masyarakat berpartisipasi), dan tahap evaluasi tergolong rendah (50% masyarakat tidak berpartisipasi). Hal ini mengindikasi bahwa masih kurangnya

keinginan masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui rehabilitasi mangrove. Sehingga peran masyarakat dibutuhkan untuk: (a) menghidupkan kembali daerah pesisir pantai akibat penebangan mangrove (alih fungsi hutan) menjadi lahan tambak, (b) mengatasi dan mencegah terjadinya abrasi pantai, dan (c) mengembalikan fungsi tanaman mangrove sebagai filter dari air laut yang telah tercemar oleh zat toksik/racun, (d) membuat habitat alami untuk pemijahan ikan serta kehidupan flora dan fauna pesisir pantai. Dengan demikian peran serta masyarakat pesisir harus dapat ditingkatkan demi pulihnya hutan mangrove yang dapat memberikan sumber penghidupan dan kelestarian sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ali MSS, Nikoyan A, Salman D, Demmalino EB, dan Summase I. (2015). Multi-Actors Collaboration in Ecolabelling Community Teak Forest Management in Southeast Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Agriculture System (IJAS)*, 3(1): 91-102.
- Ansori M. 2012. Pengelolaan Hutan Kemitraan untuk Menyejahterakan Rakyat Kasus Pola PHBM (Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat) di Perum Perhutani BKPH Parung Panjang, KPH Bogor. [Disertasi] Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Azis NA. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) : Kasus di Desa Sirnagalih dan Pamalayan, Kecamatan Bayongbong serta Desa Margaluyu dan Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. [Skripsi] Bogor. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato. 2016. Pohuwato dalam Angka. Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Baderan DWK, Hamidun MS, Lamangandjo C, dan Retnowati Y. 2015. Diversifikasi Produk Olahan Buah Mangrove Sebagai Sumber Pangan Alternatif Masyarakat Pesisir Toroseaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, 1(2): 347-351.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Bone Bolango. 2009. Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango. Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Limboto, Gorontalo.
- Bismark M, Subiandono E, dan Herianto NM. 2009. Ekosistem Hutan Mangrove. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Butolo I. 2014. Mekanisme Kolaborasi Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Program Kebun Bibit Rakyat Di Kabupaten Pohuwato. [Tugas Akhir] Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Dako R. 2014. Kondisi & Permasalahan Pengelolaan Mangrove Kabupaten Pohuwato. Koordinator Program Mangrove For the Future Teluk Tomini. [Internet]. [diunduh, 4 Agustus 2017]. Tersedia pada: http://elti.fesprojects.net/2013%20NGP_Summit/RD%20presentation.pdf
- Dewi AK. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(1): 42-52.
- Dipokusumo B. 2011. Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok). [Disertasi] Bogor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Fitri R, dan Iswahyudi. 2010. Evaluasi Kekritisian Lahan Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Hidrolitan*, 1(2): 1-9.

- Freitas JMDC. 2014. Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Utara Kota Surabaya. *JKMP*, 2(2): 103-220.
- Haikal. 2008. Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. [Skripsi] Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Jaya A. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Makalah Ilmiah. Program S3, Institut Pertanian Bogor. Bogor. [Internet]. [diunduh, 29 November 2015]. Tersedia Pada: ([http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur. Pend. Luar Sekolah/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur._Pendid._Luar_Sekolah/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf))
- Lumbessy H, Rengkung J, dan Gosal PH. 2015. Strategi Konservasi Ekosistem Mangrove Desa Mangega Dan Desa Bajo Sebagai Destinasi Ekowisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. Universitas Samratulangi. Manado.
- Morissan. 2014. Metode Penelitian Survei. Cetakan Ke-II. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muis H. 2007. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) : (Kasus di Kelurahan Layana Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara Kotamadya Palu, Sulawesi Tengah). [Disertasi] Bogor. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Nasir M. 2013. Metode Penelitian. Cetakan Ke-VIII. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Novianty R, Sastrawibawa S, dan Prihadi DJ. 2011. Identifikasi Kerusakan dan Upaya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pantai Utara Kabupaten Subang. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Nurmayanti I. 2010. Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS Cisadane Hulu. [Tesis] Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Opa ET. 2010. Analisis Perubahan Luas Lahan Mangrove Di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo dengan Menggunakan Citra Landsat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 6(2): 79-82.
- Pardosi J, Asngari PS, Tarumingkeng RC, Susanto D, dan Sumarjo. 2005. Pemberdayaan Peladang Berpindah : Kasus Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Penyuluhan IPB*, 1(1): 33-40.
- Pudjianto K. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Konservasi Sumberdaya Air di Sub DAS Keduang, Daerah Hulu DAS Bengawan Solo. [Tesis] Bogor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rusdiati K, dan Suninto S. 2012. Konversi Lahan Hutan Mangrove Serta Upaya Penduduk Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove. *Jurnal Sosialisasi Pedesaan*, 6(1): 1-17.
- Sahureka M. 2008. Implementasi Program GN-RHL di Kota Ambon. *Jurnal Agroforestri Universitas Pattimura*, 3(2): 148-156.
- Sandyatma YH, dan Hariadi SM. 2012. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Menunjang Efektivitas Gapoktan pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Bogor. *Jurnal Kawistara*, 2(3): 225-328.
- Sangadji MN. 2007. Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat. Cetakan I. dalam Pembangunan Masyarakat (Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah). CDI Press, Bogor.
- Suparwata DO. 2016. An Analysis of Public Participation on Critical Land, in Randangan Watershed, Pohuwato Regency. [Tesis] Makassar. Program Pascasarjana, Universitas Hassanuddin.
- Suparwata DO, Arsyad M, Hamidun MS, Rukmana D, Bahua MI. 2016.

Community Participation on Evaluation Stage in Critical Land Rehabilitation Program. *Advances in Environmental Biology*, 10(10): 170-180.

Theresia A, Andini KS, Nugraha PGP, dan Mardikanto T. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat)*. Cetakan Ke-1. Alfabeta, Bandung.

Triwanto J. 2012. *Konservasi Lahan Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. UMM Press, Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang: Kehutanan.

Utina R, Ahmad J, Katili AS, dan Ibrahim M. 2014a. *Konservasi Hutan Mangrove Melalui Diversitas Pangan Olahan Buah Mangrove Di Pesisir Kabupaten Pohuwato Gorontalo*. Pusat Kajian Ekologi Berbasis Kearifan Lokal. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Utina R, Ahmad J, Katili AS, dan Ibrahim M. 2014b. *Mangrove Forest Conservation Through Diversity Food Processed of Mangrove Fruit in Coastal Pohuwato Gorontalo*. Prosiding Seminar Nasional Biosains I “Biodiversitas Sebagai Penunjang Ketahanan Pangan” di Denpasar, 29 Desember 2014. Program Studi Magister Biologi Program Pascasarjana, Universitas Udayana: 80-86.

ALAMAT REDAKSI:

Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Telp/Fax: (0435) 81135/81136

Email jurnalaquabis@gmail.com

9 772301 570001

ISSN: 2301-5705